

IPTEKS EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Monica T. Ponto¹, Stanly W.Alexander²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : trifenaponto@gmail.com

ABSTRACT

One of the most important factors in office or agency work activities is salary. And within government institutions, each expenditure needs to be recorded as it should include employee salaries. Payroll Accounting System is made for Civil Servants. Sometimes there are problems that may occur during the salary disbursement procedure, namely how this research is conducted to see and evaluate whether the Payroll Accounting System in Environmental Services has been running well or not. After being seen and evaluated, the payroll accounting system in the office environment has basically been running well, effectively and efficiently. There are only a few things that must be considered when taking signatures from Authorized Officers and Budget Users. The procedure must be carried out immediately so that it can be ascertained when taking the signature of the Budget User & Commitment Making Officer in the office, not on official travel.

Keywords: Payroll Accounting System, Budget, effectively

1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah instansi pemerintahan salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah sumber daya manusia. Manusia mengambil peran penting untuk mewujudkan visi dan tujuan maupun sasaran organisasi atau dalam hal ini instansi pemerintahan. Ide, tenaga, kemampuan dan keahlian seseorang yang dituangkan demi mencapai tujuan dari kantor atau instansi menjadi tolak ukur seseorang diberikan sebuah kompensasi yang biasa didengar dengan sebutan Gaji. Kompensasi yang diberikan kepada seorang pegawai adalah berupa gaji pokok plus dengan tunjangan-tunjangan yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 43 mengatur tentang sistem penggajian dari PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di Indonesia. Menurut bapak Payaman Simanjuntak, di Indonesia sistem penggajiannya menggunakan yang namanya gaji pokok dengan dasar masa kerja dan pangkat seseorang. Tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja pun adalah dasar dari pangkat orang tersebut.

Instansi pemerintah dewasa ini harus memberikan sebuah aplikasi dari sistem penggajian yang bisa mengatasi kesalahan-kesalahan maupun penyimpanan dalam pembayaran dan perhitungan gaji. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejumlah pegawai dengan berbagai pangkat dan masa kerjanya masing-masing. Semua pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima upah dalam bentuk gaji. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil suatu tindakan penelitian untuk melihat bagaimana sistem penggajian di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan sebagaimana mestinya atau adakah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan membuat sistem penggajian belum dilakukan dengan baik sesuai dengan undang-undang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana tercantum dalam PP(Peraturan pemerintah) Nomor 71 tahun 2010 Sistem Akuntansi Pemerintahan dimulai dengan sebuah rangkaian dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain. Yang dirangkai secara sistematis agar terwujudnya fungsi akuntansi dilingkungan organisasi pemerintahan sejak analisis transaksi sampai pada pelaporan keuangan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 yang disebut dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu mereka yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, telah memenuhi syarat yang berlaku, dan telah disertai tugas dan tanggung jawab negara oleh pejabat dalam hal ini pemerintah negara dengan gaji yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang. Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamati pemerintah diwajibkan untuk membayar gaji kepada PNS dengan layak dan adil serta menjamin kesejahteraan PNS. gaji, tunjangan kemahalan, dan tunjangan kerja merupakan 3 macam komponen gaji yang dibayarkan kepada PNS Sesuai dengan Undang-undang No. 5 Thn 2014. Bisa dibilang gaji merupakan penghargaan atau sebagai tanda balas jasa atas prestasi dari kinerja pegawai. Ada dua sistem penggajian, yaitu yang pertama sistem skala tunggal dan yang kedua sistem skala ganda. Sistem skala tunggal yaitu gaji yang diberikan kepada pegawai tidak dilihat dari beratnya pekerjaan tersebut dan sifat pekerjaan yang dikerjakan. Sistem skala ganda yaitu sistem yang menetapkan besarnya gaji didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, beratnya tanggung jawab pekerjaan, prestasi kerja dan juga pangkat. Kepada pegawai yang mengambil tanggung jawab yang lebih, prestasi yang lebih tinggi akan diberikan tunjangan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan Ipteks yang digunakan yaitu mengevaluasi bagaimana berjalannya sistem akuntansi penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah berjalan baik, sudah efektif, dan sudah efisien.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan IPTEKS yang digunakan adalah mengamati dan turut mengambil bagian dalam melakukan sistem dan prosedur penggajian pegawai negeri sipil di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut (DLHD) merupakan sebuah badan. Didirikan pemerintah dengan tugasnya yaitu melaksanakan sebuah pelaksanaan kebijakan dan penyusunan daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Di kantor ini terdapat berbagai bidang yang melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Dan salah satunya adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. tugas pokok dari sub bagian ini adalah mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun program maupun rencana kerja. Selain itu menyelenggara sebuah kegiatan pengelolaan keuangan dari badan tersebut. Berikut adalah beberapa uraian tugas dari Sub Bagian Keuangan DLHD ;

1. Dibuat susunan rencana, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian dan analisa data;
2. Bahan disiapkan dan dibuat susunan rencana kerja dan program badan;
3. Bahan disiapkan dan dibuat laporan akuntabilitas serta susunan rencana strategis badan;

Kantor DLH terletak di samping kiri Kantor Gubernur yang berada di jalan 17 Agustus Manado. Yang dulunya bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, kemudian diganti menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, dan pada tahun 2017 resmi menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai dengan sekarang.

Sistem Akuntansi Penggajian PNS Dinas Lingkungan Hidup Daerah

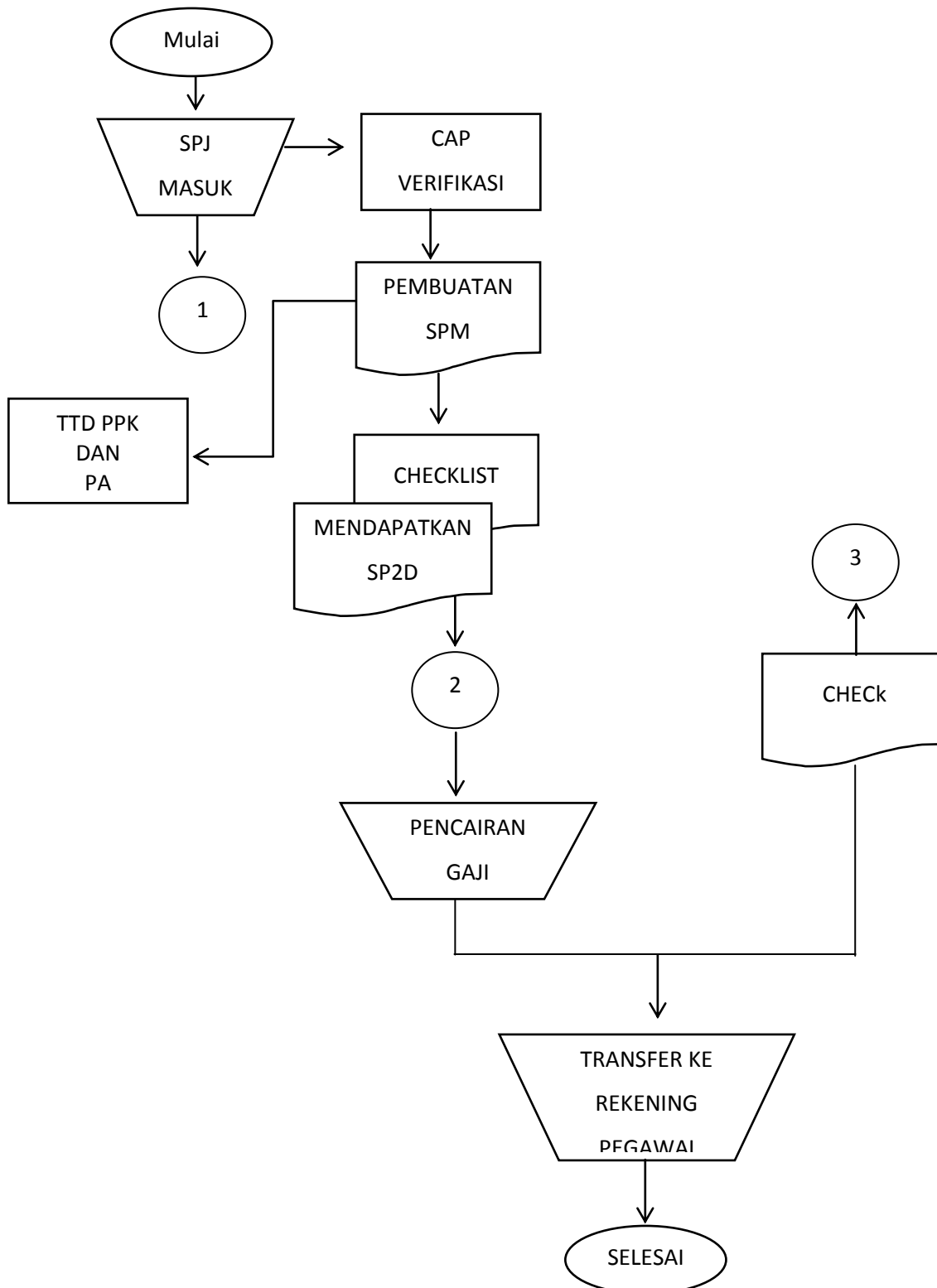
1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dari setiap bidang yang ada di DLH masuk sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Dilanjutkan ke bagian verifikasi untuk memeriksa SPJ tersebut.
3. Ditulis nama verifikasi pertanda nama-nama sudah diperiksa atau sudah diberi cap verifikasi
4. Jika sudah tidak ada kendala, setiap berkas sudah diperiksa, semua sudah lengkap dilanjutkan ke pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) semua SPJ yang akan dicairkan harus di SPM kan terlebih dahulu.
5. Setelah itu masuk ke pembuatan Checklist untuk mengecek semua berkas sudah dibuat SPM.
6. Setelah proses SPM dan checklist selesai, kembali lagi di verifikasi / diap verifikasi untuk dibawah ke Ibu Sekretaris Dinas untuk ditanda tangani. Selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen).
7. Jika sudah mendapatkan TTD dari PPK Ibu Sekretaris Dinas. Berkas SPM diantar ke Ibu. Kadis selaku Pengguna Anggaran (PA).
8. Setelah itu berkas SPM dikembalikan di sub bagian perencanaan dan keuangan untuk bagian verifikasi membawa/melanjutkan ke bagian Keuangan dan Asset Kantor Gubernur untuk dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
9. Kalau SP2D sudah selesai tinggal dicairkan direkening masing- masing lewat bank daerah kita yaitu Bank Sulut.

Bagian verifikasi	: Bpk. Herry Polihu, Ibu Nuraini Randang..
SPM	: Ibu. Vivi Rumaat, Helena Komaling
Checklist	: Bpk Reky Saisab
Bendahara	: Ibu Deisy Dimpudus
PPK	: Ibu Grace Londok, Dpl, Agr, M.Si
PA	: Ir. Marly Gumalag, M.Si
SPJ	: Bidang 1-4 dan bagian sekretariat

Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian PNS di Dinas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Surat pertanggungjawaban (SPJ) dari setiap bidang yang ada di DLH masuk sub bagian perencanaan dan keuangan.	Efektif
2.	Dilanjutkan ke bagian verifikasi untuk memeriksa SPJ tersebut.	Efektif
3.	Ditulis nama verifikasi pertanda nama-nama sudah diperiksa atau sudah diberi cap verifikasi	Efektif
4.	Jika sudah tidak ada kendala, setiap berkas sudah diperiksa, semua sudah lengkap dilanjutkan ke pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) semua SPJ yang akan dicairkan harus di SPM kan terlebih dahulu.	Efektif
5.	Setelah itu masuk ke pembuatan Checklist untuk mengecek semua berkas sudah dibuat SPM.	Efektif
6.	Setelah proses SPM dan checklist selesai, kembali lagi di verifikasi / diap verifikasi untuk dibawah ke Ibu Sekretaris Dinas untuk ditanda tangani. Selaku PPK(Pejabat Pembuat Komitmen).	Kurang Efektif
7.	Jika sudah mendapatkan TTD dari PPK Ibu Sekretaris Dinas. Berkas SPM diantar ke Ibu. Kadis selaku Pengguna Anggaran (PA).	Kurang Efektif
8.	Setelah itu berkas SPM dikembalikan disub bagian perencanaan dan keuangan untuk bagian verifikasi membawa/melanjutkan ke bagian Keuangan dan Asset Kantor Gubernur untuk dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Efektif
9	Kalau SP2D sudah selesai tinggal dicairkan direkening masing- masing lewat bank daerah kita yaitu Bank Sulut.	Efektif

Flowchart Sistem Akuntansi Pengkajian Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulut



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sistem akuntansi penggajian pegawai negeri sipil di dinas lingkungan hidup ini sudah berjalan dengan baik sebagai mana mestinya, karena disub bagian keuangan sudah terbagi job desk atau tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk prosesnya semakin cepat. Hanya terkadang yang membuat lama proses pencairannya ialah jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) tidak berada didalam kantor atau sedang tugas luar. Berdasarkan IPTEKS yang telah diterapkan dikantor ini; Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil evaluasi sistem akuntansi penggajian sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien Walaupun masih ada kendala-kendala kecil. Tapi selebihnya sudah baik, apalagi ketika berkas SPM dibawa ke kantor gubernur, salah satu keuntungan kantor ini adalah kantornya dekat dengan kantor gubernur yang memudahkan untuk membawa, bahkan lebih cepat untuk sampai dan diproses berkasnya. Juga mengirit biaya transport.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , penulis akan memberikan beberapa saran yang bisa menjadi hal yang mungkin akan berguna dan bermanfaat dimasa mendatang ketika sedang/akan memproses gaji yang ada dikantor :

1. Jangan menunda pekerjaan yang ada, untuk menghindari keterlambatan dalam proses pengambilan tanda tangan dari pihak PPK dan PA.
2. Komunikasikan dengan baik apa yang anda kerjakan dan apa yang diarahkan untuk dikerjakan agar tidak terjadi mis komunikasi.
3. Setiap orang harus bekerja dengan baik untuk tiap bagiannya. Tanpa adanya salah satu, bisa jadi pekerjaan akan tertunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai *Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil*.
- Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai *Sejarah Instansi*.
- Mulyadi . 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novita. 2016. *“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada UPTD SMPN 1 Purwoasri Kabupaten Kediri*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia: Kediri.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Standar Akuntansi Pemerintahan* sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Thn 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 43 Thn 1999 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*.
-